

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nilai perusahaan merupakan konsep penting bagi investor karena merupakan indikator penilaian pasar terhadap perusahaan secara keseluruhan. Tujuan utama perusahaan adalah dengan memaksimalkan nilai perusahaan (Warapsari dan Suaryana, 2016). Suwardika dan Mustanda (2017) berpendapat bahwa :

Nilai perusahaan tidak hanya dapat digambarkan pada harga saham suatu perusahaan saja, untuk mengukur tingginya nilai perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satu alat ukur yang dapat digunakan yaitu price to book value. Brigham dan Houston (2011:152) menyatakan bahwa *Price to Book Value* (PBV) merupakan rasio keuangan yang membandingkan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Apabila nilai PBV yang semakin tinggi maka semakin besar pula tingkat kemakmuran dari pemegang saham, sehingga perusahaan dikatakan telah mencapai salah satu tujuannya.

Berikut ini data mengenai besarnya nilai perusahaan pada semua sektor perusahaan pada tahun 2016-2018 yang diukur menggunakan *Price Book Value* (PBV). Besarnya hasil perhitungan harga pasar saham terhadap nilai bukunya menunjukkan perbandingan antara kinerja saham perusahaan di pasar saham dengan nilai bukunya (Suastini, dkk. 2016). Data tersebut diperoleh melalui *Indonesia Stock Exchange*.

Tabel 1.1 Data Nilai Perusahaan

Sektor	PBV		
	2016	2017	2018
Pertanian	3,02	3,02	1,96
Pertambangan	1,67	1,67	3,24
Industri dasar dan kimia	5,83	5,83	1,87
Aneka industry	1,24	1,24	1,30
Industri Barang Konsumsi	5,58	5,58	5,65
Properti, real estate dan konstruksi bangunan	1,78	1,78	2,19
Infrastruktur, utilitas dan transportasi	4,17	4,17	1,82
Finansial	1,97	1,97	2,27
Perdagangan, jasa dan investasi	6,43	6,43	2,72

Data yang disajikan pada *Indonesia Stock Exchange* menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 semua sektor perusahaan mengalami kondisi yang stagnan pada nilai perusahaannya yang diukur menggunakan PBV. Selanjutnya pada tahun 2018 beberapa perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan nilai perusahaan. Diantara perusahaan yang mengalami kenaikan yaitu sektor Industri Barang Konsumsi, sektor Aneka Industri, Properti, real estate dan konstruksi bangunan, sektor Finansial, dan sektor Pertambangan. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor Pertanian, sektor Industri dasar dan kimia, sektor Infrastruktur, utilitas dan transportasi dan sektor Perdagangan, jasa dan investasi. Pada data tersebut diketahui bahwa sektor pertambangan mengalami kenaikan yang paling tinggi diantara sektor yang lain yaitu sebesar 1,57, sedangkan untuk sektor yang mengalami penurunan paling besar yaitu sektor industri dasar dan kimia.

Dibalik tingginya nilai perusahaan tidak terlepas dari kepemilikan saham para investor sekaligus pemilik perusahaan. Dirangkum dari situs berita online pada Maret 2019 bahwa Kementerian Bidang Koordinator Perekonomian mencatat masih banyak perusahaan yang belum melaporkan secara transparan kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau *Beneficial Ownership (BO)* terutama perusahaan ekstraktif atau perusahaan Pertambangan. Hal ini disebabkan karena belum adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang belum melakukan transparansi kepemilikan. Pemerintah Indonesia terus mendorong transparansi kepemilikan sebagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pencucian uang serta untuk menambah pemasukan negara dari perpajakan industri pertambangan. Selain itu ketersediaan informasi BO harus akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Pengungkapan informasi tersebut juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi risiko finansial. Setidaknya diketahui bahwa baru sedikit perusahaan ekstraktif di Indonesia yang melakukan BO. Pengungkapan BO juga akan memberi kepercayaan kepada calon investor karena ketersediaan informasi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan patuh aturan dan tidak melakukan penyelewengan.

Peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi *shareholder* maupun *stakeholder* dalam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan memaksimalkan modal kerja yang dimiliki (Warapsari dan Suaryana, 2016).

Dalam praktiknya, pemilik atau pemegang saham akan menyerahkan perusahaan kepada manajemen untuk dikelola agar menghasilkan keuntungan atas investasinya tersebut. Penyerahan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepemilikan dengan pengendalian. Jensen dan Meckling (1976) bahwa pemisahan kepemilikan dan pengendalian dapat menyebabkan perbedaan kepentingan diantara agen dan pemilik perusahaan. Dalam upaya untuk menaikkan nilai perusahaan, tidak jarang pihak manajemen perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan termasuk juga mengabaikan kepentingan pemegang saham (Fahdiansyah, dkk.2018). Timbulnya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah yang melatarbelakangi perlunya pengelolaan perusahaan yang baik (Muryati dan Suardikha, 2014).

Dengan adanya struktur kepemilikan diharapkan mampu mengurangi konflik keagenan yang terjadi. Lukviarman (2016) berpendapat bahwa :

Terdapat insentif bagi pemilik perusahaan yang menguasai jumlah saham yang besar untuk memonitor secara intens investasi yang dilakukan, dengan asumsi bahwa tingkat pengendalian yang dilakukan akan meningkat sesuai besaran porsi saham yang dimiliki. Dengan demikian, kepemilikan dalam jumlah besar atau terkonsentrasi kepada pihak tertentu dapat berfungsi sebagai mekanisme alternatif dalam implementasi *corporate governance*. Kondisi ini diharapkan dapat meminimalkan biaya pengawasan yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan kinerja perusahaan sebagaimana yang diharapkan oleh para pemegang saham.

Menurut Fahdiansyah, dkk. (2018) pada prinsipnya struktur kepemilikan merupakan sebaran kepemilikan saham yang ada pada sebuah perusahaan. Struktur kepemilikan ini sendiri terbagi dalam beberapa jenis kepemilikan, antara lain kepemilikan institusional, kepemilikan perseorangan

yang mana termasuk di dalamnya adanya kepemilikan dari pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengindikasikan menurunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen (Aldino, 2015). Kepemilikan manajerial dapat dipandang dengan mensejajarkan manajemen dan pemegang saham, sehingga semakin tinggi kepemilikan manajerial akan semakin tinggi pula nilai perusahaan (Pratiwi, dkk.2016). Kepemilikan saham oleh manajemen akan membuat manajemen meningkatkan kinerjanya dan akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Selain itu, tindakan *opportunistic* manajer juga dapat diminimalisir dengan meningkatkan kepemilikan manajerial (Warapsari dan Suaryana, 2016).

Menurut penelitian Fahdiansyah, dkk. (2018), Pratiwi (2016), dan Muryati dan Suardikha (2014) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Budianto dan Payamta (2014), Suastini, dkk. (2016) dan Hariyanto dan Lestari (2015) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Warapsari dan Suaryana (2016), Dewi dan Sanica (2017), Sumanti dan Mangantar (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Selain kepemilikan oleh manajemen, ada juga kepemilikan oleh institusi. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor

manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Dewi dan Sanica, 2017). Pihak pemegang saham dari luar perusahaan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dalam kinerja perusahaan agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan manajer (Hariyanto dan Lestari, 2015). Tingginya jumlah kepemilikan institusional akan meningkatkan sistem kontrol perusahaan yang ditujukan guna meminimalisasi tingkat kecurangan akibat tindakan oportunistik pihak manajer yang nantinya dapat mengurangi nilai perusahaan. Adanya kepemilikan institusional yang tinggi akan memicu peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kualitas dan kelangsungan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mengoptimalkan nilai perusahaan (Apriada dan Suardikha, 2016).

Menurut penelitian Fahdiansyah, dkk. (2018), Pratiwi (2016), Muryati dan Suardikha (2014) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Rahma (2014), Hariyanto dan Lestari (2015), dan Juhandi, dkk. (2013) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Warapsari dan Suaryana (2016), Dewi dan Sanica (2017), Dewi dan Nugrahanti (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Pada teori agensi menyatakan bahwa terjadinya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen dapat diminimalisir dengan adanya pengelolaan perusahaan yang baik. Pada penelitian ini pengelolaan diprosikan dengan

komite audit. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham, dewan komisaris, dan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Wibowo, 2016). Tugas dari komite audit adalah untuk memberikan masukan profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh pihak direksi kepada dewan komisaris serta meninjau hal-hal yang memerlukan perhatian dari dewan komisaris (Tambunan, dkk. 2017). Selain itu, komite audit berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang telah disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan objektivitas dari auditor. Dalam hal manipulasi data keuangan, komite audit memberikan kontribusi dalam membantu memeriksa data pada laporan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Onasis dan Robin, 2016).

Penelitian Onasis dan Robin (2016), Syafitri, dkk. (2018), dan Sari dan Riduwan (2013) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Muryati dan Suardikha (2014), Tambunan, dkk. (2017) dan Prastuti dan Buadiah (2015) bahwa komite berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Wardoyo dan Veronica (2013), Wibowo (2016) dan Amrizal dan Rohmah (2017) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Lukviarman (2016) berpendapat bahwa:

Keberadaan *Corporate Governance* (CG) memiliki implikasi luas dan kritical terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pertama, menyediakan insentif dan ukuran penilaian kinerja di dalam mencapai kesuksesan sebuah bisnis. Kedua, menyediakan mekanisme untuk penilaian akuntabilitas dan transparansi dalam menjamin bahwa peningkatan

kesejahteraan, sebagai dampak dari peningkatan nilai perusahaan, telah didistribusikan secara merata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran nilai perusahaan tidak terlepas dari kinerja perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang (Wardoyo dan Veronica, 2013). Semakin baik kinerjanya maka semakin meningkatkan nilai perusahaan. Dalam mengukur kinerja perusahaan investor biasanya melihat kinerja keuangan yang tercermin dari berbagai macam rasio (Wardoyo dan Veronica, 2013). Salah satu rasio yang dapat digunakan adalah ROA. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan (Hermiyetti dan Katlanis, 2017).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA terhadap nilai perusahaan. Diantaranya Sumanti dan Mangantar (2015), Rudangga dan Sudiarta (2016) dan Onasis dan Robin (2016) bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Putu, dkk. (2014), Kusuma, dkk. (2013) dan Ramashar dan Hasan (2018) bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan

penelitian Astiari (2014), Wibowo (2011), Hermawan dan Maf'ulah (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Fahdiansyah, dkk. (2018) yang meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Objek penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada pengukuran nilai perusahaan. Serta menambah komite audit dan kinerja keuangan sebagai variabel independen. Alasan memilih sektor Pertambangan karena tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait peningkatan nilai perusahaan yang diukur menggunakan PBV yang mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan sektor lain. Dan untuk menguji apakah variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap peningkatan nilai tersebut. Pada penelitian sebelumnya nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin Q, pada penelitian ini menggunakan PBV (*Price Book Value*). Objek penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Penggantian pengukuran tersebut dilakukan karena *Price to Book Value* (PBV) mengukur nilai suatu saham, mengukur nilai perusahaan lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen dapat memanfaatkan sumber daya ekonomis dalam kebijakannya untuk mengambil keputusan dalam

berinvestasi dan potensi pertumbuhan suatu perusahaan dimasa yang akan datang (Amrizal dan Rohmah, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ?
4. Apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 dan variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan kinerja keuangan.

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
2. Untuk menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

3. Untuk menemukan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
4. Untuk menemukan bukti empiris bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

E. Manfaat penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan menjadi tinggi.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh struktur kepemilikan, komite audit dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kinerja perusahaan serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik bahasan yang serupa.

